

SERUNI MAGAZINE

* KARYA SERUNI UNTUK NEGERI

INDONESIA MENGAJAR
"Guru sebagai Akses Utama Pendidikan"

PUSAT STUDI PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN

"Transformasi untuk Masyarakat Berdaya Saing"

GERAKAN UI MENGAJAR
"Mahasiswa UI Gak 'Napak Bumi'?"

INDAH SHAFIRA
"PAUD sebagai Pondasi Kuat Pendidikan"

CECEP DARMAWAN
"Otonomi vs Beban Keuangan: Dilema Sebuah PTNBH"

**MAMPUKAH INDONESIA
MENCETAK GENERASI
EMAS?**



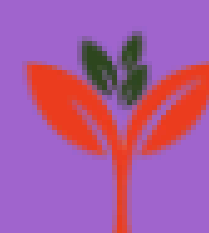
Mitra kami:



PUSAT STUDI PENDIDIKAN
DAN KEBIJAKAN



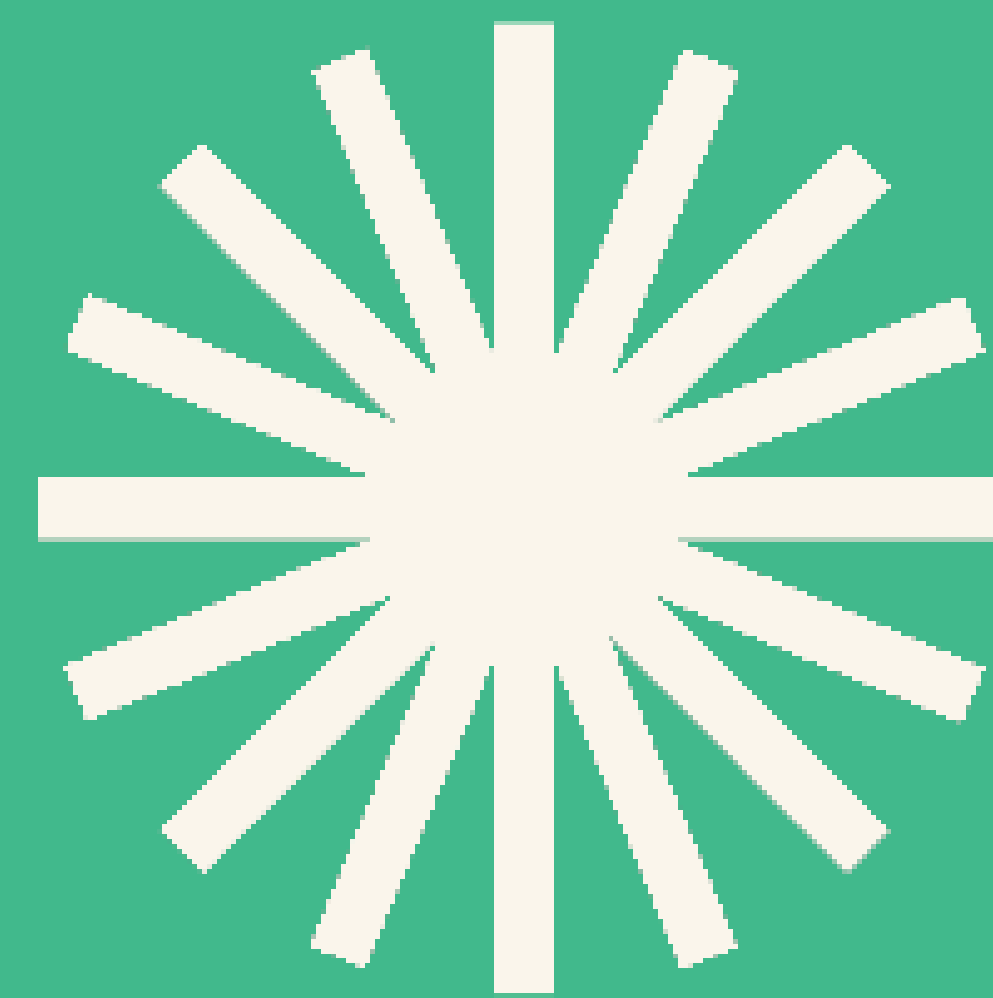
PHiL
& CO



INDONESIA
MENGAJAR

**EDISI
PERTAMA**

SALAM REDAKSI



Halo, Teman Negeri! Pada tahun ke-10 acara ini berdiri, Sarasehan untuk Negeri mencetuskan sebuah inovasi baru, yaitu merangkai sebuah majalah bernama Seruni Magazine. Majalah yang mencakup pendapat berbagai pihak ini bertujuan untuk membuka wawasan teman-teman tentang tema yang Seruni tahun ini bawa, yaitu **“Realitas Kebijakan Pendidikan Negeri, Berpihak pada Siapa?”** sehingga teman-teman dapat melihat isu tersebut lewat berbagai kacamata, mulai dari kacamata lembaga nirlaba sampai kacamata peneliti di bidang ini. Harapannya, majalah ini dapat membantu teman-teman dalam memahami kompleksitas kebijakan pendidikan di Indonesia dan menyadari signifikansinya dalam upaya pembangunan bangsa. Selain itu, kami juga berharap teman-teman dapat terinspirasi untuk ambil peran dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia dengan cara masing-masing. Bersama Seruni, mari bergerak dan berdampak!

“PENDIDIKAN TIDAK MENGUBAH DUNIA. PENDIDIKAN MENGUBAH MANUSIA DAN MANUSIA MENGUBAH DUNIA.” – PAULO FREIRE

Halo, Teman Negeri!

KRU KAMI

Pemimpin Redaksi:
Fahmi Ibrahim

Wakil Pemimpin Redaksi:
Corrina Hazimah Ismailia

Redaktur Pelaksana:
Afnan Ahzami

Tim Kreatif:

Shafwan Nugraha

Verrys Paath

Wilda Ahmad Mansyur

Vanesa Yang



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Tentang Seruni..... | 1 |
| Ada Apa dengan Pendidikan?..... | 2 |
| Harapan di Ujung Republik: Guru sebagai Akses Utama Pendidikan..... | 3 |
| <i>Indonesia Mengajar</i> | |
| Transformasi Pendidikan Kolaboratif untuk Masyarakat Indonesia yang Berdaya Saing..... | 5 |
| <i>Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan</i> | |
| PAUD sebagai Fondasi Kuat dalam Pendidikan..... | 7 |
| <i>Indah Shafira</i> | |
| Mahasiswa UI Gak 'Napak Bumi'?!..... | 9 |
| <i>Gerakan UI Mengajar</i> | |
| Fakta-fakta Mencengangkan Sistem Pendidikan di Dunia, no. 8 Bikin Geleng-geleng!..... | 11 |
| Otonomi vs. Beban Keuangan: Dilema Sebuah PTNBH..... | 13 |
| <i>Cecep Darmawan</i> | |
| Bosan dengan Rutinitas Kuliah? Atau Suka Mengajar? Simak 4 Program Volunteer yang Wajib Kamu Ikuti!..... | 15 |
| Potret Seruni..... | 16 |

Tentang Seruni

Sarasehan untuk Negeri (Seruni) merupakan suatu inisiasi berupa ruang edukasi dan diskusi yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di bawah naungan Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI.

The 10th Seruni hadir sebagai sarana yang berorientasi menciptakan ruang yang efektif dan inklusif untuk berdialog dan berpikir kritis bagi publik, khususnya pelajar (mahasiswa), akademisi, dan praktisi, dalam mengeksplorasi isu-isu yang terkait dengan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia sehingga dapat memunculkan ide dan solusi dari beragam perspektif.

Nilai Kami

Empati.

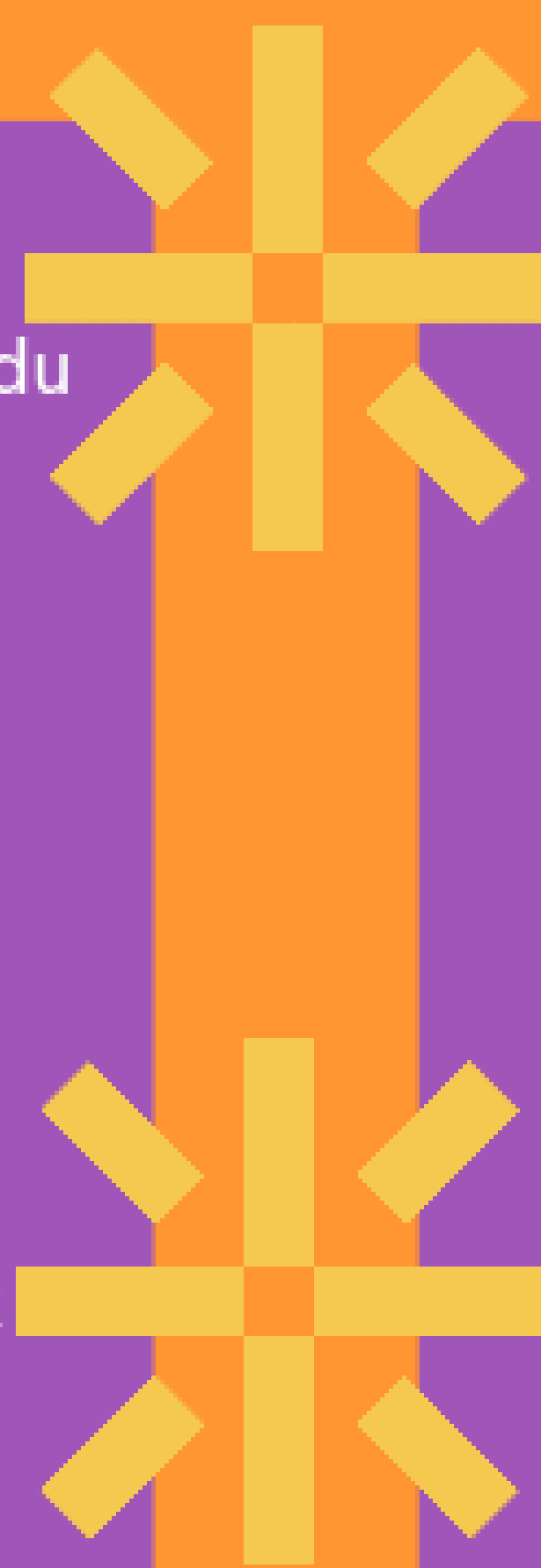
Sikap yang muncul sebagai pemicu individu untuk merespon isu-isu yang beredar

Dinamis.

Upaya untuk merespon isu yang bersifat cepat dan kompleks dengan keterampilan adaptasi yang tinggi.

Pemberdayaan.

Proses menjaga eksistensi suatu isu untuk meningkatkan antusiasme kolektif.



Tujuan Kami

To Inspire.

Menginspirasi masyarakat dalam menyadari dan menyikapi suatu isu

To Improve.

Membangun kesadaran masyarakat untuk turut mengambil andil dalam perbaikan kualitas hidupnya.

To Illuminate.

Menyentuh empati masyarakat terhadap isu yang sebelumnya cenderung terabaikan.

Grand Theme

Realitas Kebijakan Pendidikan Negeri,
Berpihak kepada Siapa?

Sub-Theme

Penganggaran
Biaya Pendidikan

Akses dan Infrastruktur
Pendidikan

Kurikulum
dan Sistem



ADA APA DENGAN PENDIDIKAN?

Saat matahari perlahan menampakkan dirinya dari ujung timur, 53,14 juta murid di Indonesia bersiap untuk memulai harinya dari ruang kelas. Sebagian bergegas menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, dan sebagian lainnya perlu berusaha berkali lipat — menyebrangi sungai dan jalan-jalan setapak — untuk hadir dan menyerap ilmu. Kadang kala, hanya ada segelintir guru yang bertugas mengemban tanggung jawab secara simultan untuk banyaknya murid di satu sekolah, bahkan wilayah. Bukan karangan belaka, cerita ini merupakan realitas yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam menanggapi hal tersebut dan beragam tantangan lainnya dalam lanskap pendidikan Indonesia, selama dekade terakhir, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk melakukan transformasi positif dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang membawa manfaat nyata. Tidak hanya dari segi akses, tetapi juga secara kualitas. Adanya transformasi ini direalisasikan oleh kebijakan yang lahir dari proses politik. Namun, suatu kebijakan sering kali memiliki kekurangan dalam memenuhi harapan semua pemangku kepentingan. Kita dapat berefleksi dari status quo dalam kebijakan dan sistem pendidikan Indonesia yang selama ini dinilai cenderung memiliki karakteristik complex interplay antara tanggung jawab sosial, bisnis, dan intervensi pasar, yang dapat membuat sulit untuk menavigasi keberpihakan kebijakannya dengan efektif.

Agar kebijakan pendidikan menjadi tepat dalam merumuskan tujuan dan mengarahkan poros keberpihakannya pada subjek dan objektif yang sesuai, maka diperlukan suatu parameter yang dapat memastikan bahwa perumusan kebijakan pendidikan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan dalam menunjang masa depan industri atau mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga secara holistik dapat mendorong pelajar menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan tangguh secara menyeluruh. Dalam hal ini, peran good governance dalam institusi yang sehat menjadi sangat krusial. Good governance dalam konteks kebijakan pendidikan berarti adanya keterbukaan, partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta akuntabilitas dalam setiap tahap perancangannya. Penerapan good governance juga memerlukan langkah tegas dalam berinovasi dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan yang telah ada. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki andil yang aktif dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada, serta turut mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal-hal tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konkret terhadap masa depan pendidikan Indonesia, The 10th Seruni (Sarasehan untuk Negeri) melalui tema besar **“Realitas Kebijakan Pendidikan Negeri, Berpihak kepada Siapa?”** hadir sebagai sarana yang berorientasi dalam menciptakan ruang yang efektif untuk berdialog dan berpikir kritis bagi para pelajar (mahasiswa), akademisi, dan praktisi dalam mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan, khususnya dalam era pemerintahan yang baru, dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan tidak luput dari prinsip-prinsip good governance.

Dalam pembahasannya, The 10th Seruni membagi tema besar menjadi tiga lingkup, yaitu **1) Kurikulum dan Sistem, 2) Penganggaran Biaya Pendidikan, dan 3) Akses dan Infrastruktur Pendidikan** untuk meninjau realitasnya secara komprehensif. Pembahasan-pembahasan ini kemudian direalisasikan melalui tujuh program yang juga bersifat kolaboratif: Seruni Magazine, Seruni Roadshow, Diskusi Anak Negeri, Langkah Kecil untuk Negeri, Teater Kebangsaan, Seruni Talks on Stage, dan ditutup dengan diskusi terbuka di acara BerembukBerdampak.

Dengan terlibatnya banyak pihak dari layer yang berbeda-beda, peran, dan rangkaian acara yang beragam, inisiasi ini diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat mengevaluasi pengimplementasiannya dan orientasi yang diwariskan dari pemerintah-pemerintah terdahulu sembari tetap mempertahankan harapan dan aspirasi yang ada.

HARAPAN DI UJUNG REPUBLIK:

GURU SEBAGAI AKSES UTAMA PENDIDIKAN

Perpaduan antara semburat oranye yang mencumbu laut, hijaunya lembah di seberang teluk, dan langit yang menjelang redup. Masih teringat betapa terkesimanya saya saat pertama kali datang ke Desa Iseren sebagai Pengajar Muda dari Indonesia Mengajar. Di Iseren saya bertemu dengan Pak Aspar, satu-satunya guru yang saat itu mengajar di sana. Pertemuan yang membuat rasa kagum terhadap bentang alam di bumi Teluk Wondama ini kemudian berubah menjadi kecurigaan. Jangan-jangan pemandangan matahari terbenam di Iseren sebenarnya bertugas untuk mengelabui kita dari sisi lain daerah ini yang tidak semegah potret alamnya. Teluk Wondama adalah salah satu dari 10 kabupaten yang masih aktif menjadi daerah sasaran Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar sejak 2010 terus mengirimkan Pengajar Muda ke pelosok Indonesia. Selain sebagai wahana sekolah kepemimpinan bagi sarjana yang memiliki kompetensi kelas dunia, program ini juga menyasar salah satu akses pendidikan yang masih saja menjadi dilema; ketidakmerataan guru.

GURU SEBAGAI AKSES

Obrolan di ruang-ruang diskusi sering mengartikan akses dan infrastruktur pendidikan dalam bentuk material; jalan, gedung, meja, kursi, dan lainnya. Gelontoran anggaran pun diturunkan demi pengadaan material tersebut. Pengalaman saya melihat banyak alat peraga serta unit komputer dikirimkan ke sekolah. Bahkan sampai di ujung republik pun barang-barang tersebut diusahakan. Walau beberapa ada pula yang berujung mangkrak di gudang kantor. Terbengkalai karena minim sosialisasi atau pelatihan kepada guru yang akan mengoperasikannya.

Di balik hitung-hitungan pengadaan infrastruktur fisik sekolah ataupun perdebatan sistem kurikulum yang terbaik, guru tetaplah garda terdepan akses pendidikan anak-anak Indonesia. Mereka yang pada akhirnya akan berhadapan langsung dengan siswa di ruang kelas. Sayangnya kita terkadang entah luput atau entah menganggap guru sudah cukup pintar untuk berkembang dan memikirkan nasibnya sendiri. Padahal seyogyanya ketersediaan guru yang kompeten sebagai akses pendidikan adalah standar minimal yang harus diusahakan oleh negara.

TANTANGAN GURU DI INDONESIA

Hingga kini, Indonesia berhadapan dengan realita pendidikan di lapangan, variasi kualitas dan distribusi guru. Di beberapa provinsi di Papua dan Nusa Tenggara Timur, tingkat kekurangan guru bahkan mencapai 30-40%. Ini berarti bahwa di setiap 10 posisi guru yang dibutuhkan, hanya ada 6-7 guru yang hadir. Keabsenan jumlah ini salah satunya disebabkan karena rendahnya minat generasi muda menjadi guru, yang jika kita tarik lebih jauh lagi akar masalahnya akan sampai ke kualitas kesejahteraan guru yang belum terjamin. Sebuah hal yang kemudian lazim ditemukan di penempatan Pengajar Muda; ada saja oknum guru yang harus meninggalkan tugas demi menjalani mata pencaharian lain agar bisa menutupi kebutuhan sehari-hari.

Belum lagi usai tantangan untuk memenuhi ketersediaan guru, di daerah-daerah terpencil itu guru-guru juga kerap mengalami kebingungan menghadapi perubahan kurikulum yang diganti setiap 5-10 tahun. Seringkali, tingkat penerapan kurikulum baru berbanding terbalik dengan jarak geografis daerah dari Jakarta. Semakin jauh dari pusat ibukota, waktu seolah terasa lebih lambat. Di SDN Iseren tempat saya mengajar bersama Pak Aspar misalnya, saat saya datang di tahun 2022, sekolah kami masih menerapkan kurikulum KTSP 2006. Sebuah kondisi yang seharusnya menimbulkan banyak pertanyaan—kenapa?

Belum lagi usai tantangan untuk memenuhi ketersediaan guru, di daerah-daerah terpencil itu guru-guru juga kerap mengalami kebingungan menghadapi perubahan kurikulum yang diganti setiap 5-10 tahun. Seringkali, tingkat penerapan kurikulum baru berbanding terbalik dengan jarak geografis daerah dari Jakarta. Semakin jauh dari pusat ibukota, waktu seolah terasa lebih lambat. Di SDN Iseren tempat saya mengajar bersama Pak Aspar misalnya, saat saya datang di tahun 2022, sekolah kami masih menerapkan kurikulum KTSP 2006. Sebuah kondisi yang seharusnya menimbulkan banyak pertanyaan—kenapa?

Namun sayangnya di akar rumput masyarakat kita tidak dibiasakan untuk mempertanyakan, atau kalaupun bertanya, kepada siapa gugatan itu bisa diajukan?

Terlepas dari kurikulum terkini apa yang sedang digaungkan pemerintah, para guru tetap berusaha menghidupkan sekolah menjadi ruang belajar yang menyala. Karena bagaimanapun anak-anak akan terus tumbuh, mereka tidak bisa menunggu gonta-ganti sistem yang seakan memiliki zona waktunya sendiri.





Mulyasa (2003) dalam bukunya yang berjudul “Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi” menjelaskan bahwa betapa pun bagusya suatu kurikulum, hasilnya akan tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan juga siswa di kelas. Hal ini membuktikan bahwa bagaimanapun guru adalah garda terdepan dari akses pendidikan di lapangan. Selaras dengan kondisi tersebut, di tengah keterbatasan infrastruktur menuju titik-titik terpencil republik, kami tak pernah usal menemui hadirnya guru-guru hebat yang hadir menjadi pemeran utama menerangi pendidikan.

PENGAJAR MUDA DI DAERAH

Indonesia Mengajar tidak berambisi hadir menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Kami selalu percaya kemajuan pendidikan haruslah lahir dari kerja bersama dan bersifat inklusif. Sehingga di samping adanya kesatuan sistem kurikulum, afirmasi terhadap variasi kebutuhan dan konteks daerah juga tidak kalah penting untuk diperhatikan.

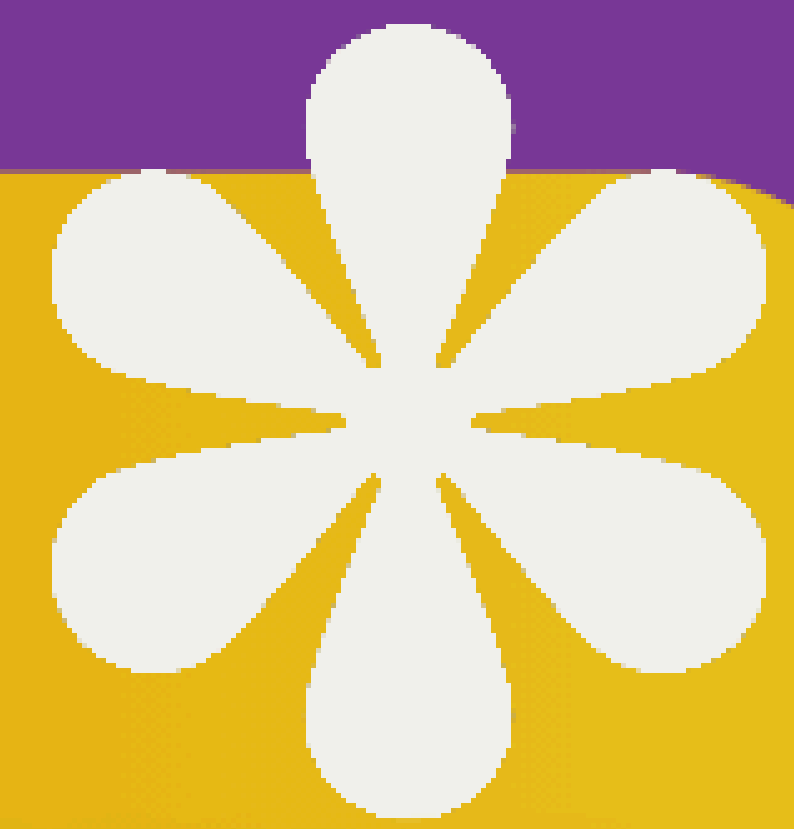
Pengajar Muda tidak diberangkatkan ke daerah untuk mensubstitusi peran guru. Kami sadar betul bahwa guru-guru punya potensi dan semangat untuk terus memajukan pendidikan. Jauh sebelum adanya kurikulum merdeka, saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Aspar dari desa terpencil di Teluk Wondama meramu sendiri pembelajaran yang kontekstual dengan siswa di Iseren. Terkadang ruang kelas pindah ke pinggir pantai, mendekatkan mereka dengan realita yang dihidupi sehari-hari.

Hadirnya Pengajar Muda adalah menjadi katalisator masyarakat. Kami percaya, kemajuan pendidikan adalah formulasi gerakan serentak kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Di titik-titik terpencil Indonesia, kelayakan infrastruktur memang masih kerap tak tepat waktu. Ketersediaan dan kesejahteraan guru-guru pun masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang tak dapat dibantah. Namun, hal tersebut tidak menafikan bahwa masih tetap ada aktor yang semangat menjadi akses utama pendidikan. Mereka hanya perlu pemantik yang menguatkan bahwa mereka tak pernah sendirian.

INDONESIA MENGAJAR

Penulis: Haradzatul Jushar,
Pengajar Muda Indonesia
Mengajar tahun 2022 dengan
penempatan di Teluk Wondama,
Papua Barat.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN KOLABORATIF UNTUK MASYARAKAT INDONESIA YANG BERDAYA SAING



Berbagai kajian (Gembong Baskoro 2023), seperti Zakharov, Y. (2022), Bharti Meghani Mishra, et.al (2024), Salun, et.al. (2024)), telah menggambarkan tantangan global di masa depan seperti disrupsi teknologi, keterbatasan ketersediaan sumber daya alam, keuangan global, dinamika geopolitik, dan berbagai hal lain yang terangkum dalam narasi kecenderungan besar dunia (global megatrend). Berangkat dari hal tersebut, penting bagi kita untuk membekali anak-anak bangsa untuk dapat berdaya saing di era BANI (brittle, anxious, nonlinear, and incomprehensible), yang dimaknai sebagai era yang semakin lebih tidak terprediksi lagi dari yang sebelumnya disebut sebagai era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) yang menunjukkan situasi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian.

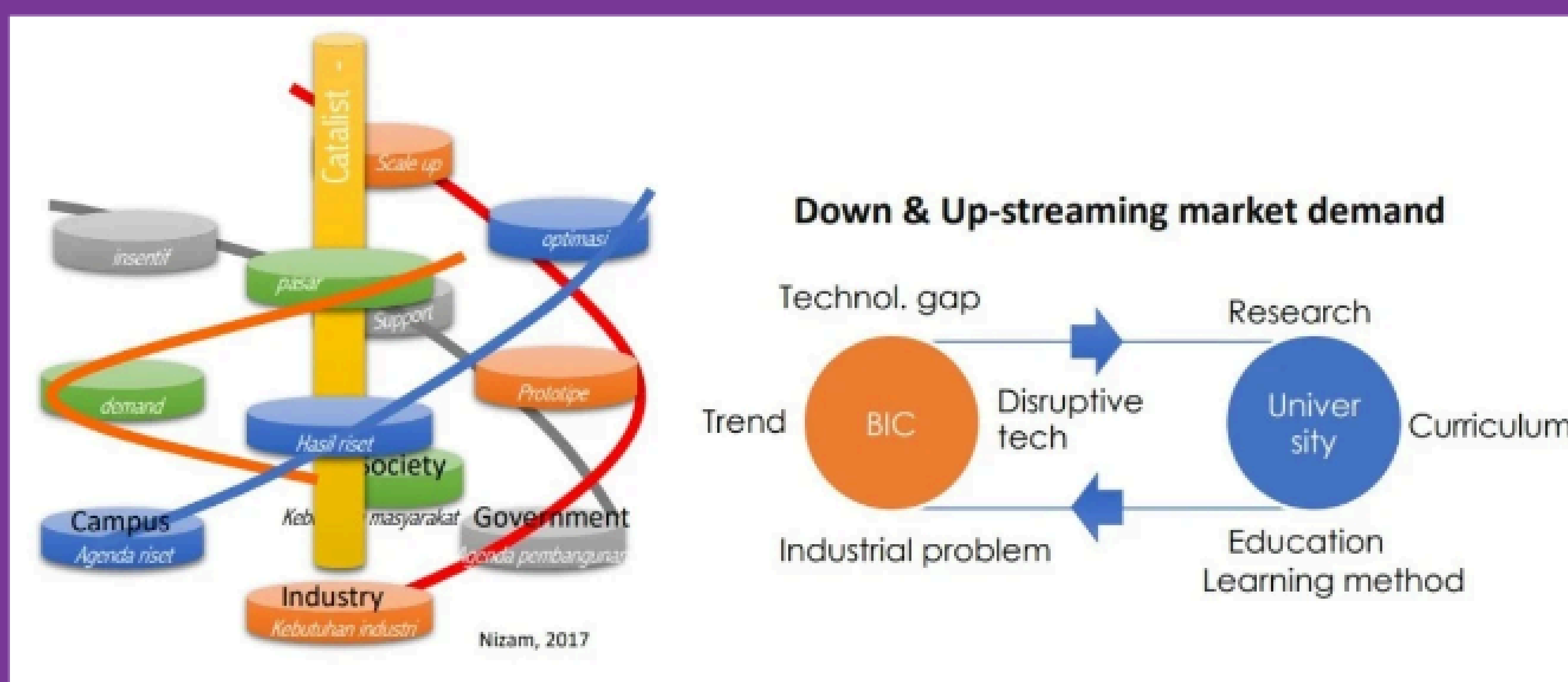
MENERUSKAN ESTAFET TRANSFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG BERKEADILAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan anak-anak bangsa dengan kemampuan serta keterampilan yang esensial untuk tantangan hari ini dan di masa depan, sehingga penting untuk mengkontekstualisasi berbagai dinamika dan perkembangan di lingkungan anak ke dalam pembelajaran. Paradigma bahwa setiap manusia harus menjadi pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) merupakan pendekatan utama dari pendidikan di Indonesia saat ini, sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJPN 2025-2045. Pendekatan ini diimplementasikan karena manusia yang berdaya saing adalah manusia yang mampu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Selama 2 dekade terakhir, pemerintah telah mengerahkan usaha untuk merancang sistem pendidikan yang fleksibel serta adaptif untuk menyikapi tantangan global. Melalui pemberlakuan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Pemerintah telah memandatkan urgensi dari pembangunan manusia secara holistik sebagai bagian dari subjek (human capital), objek (human resources), dan penerima manfaat utama dari pembangunan. Semangat dari strategi pembangunan manusia ini kemudian dilanjutkan dalam reformasi pendidikan "Merdeka Belajar" yang melihat dan mengakui kompleksitas dari sistem pendidikan, dan bagaimana beragam elemen yang saling terkait, salah satunya melalui kurikulum, mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Melalui pemberlakuan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional (permendikbud no. 14 tahun 2024), negara sejatinya melihat anak sebagai pemeran aktif dalam pembelajaran dan menaruh kebutuhan anak sebagai pusat dari pembelajaran serta melihat aktor-aktor dalam sistem pendidikan seperti guru, kepala sekolah serta pemerintah daerah sebagai pemimpin instruksional yang mendukung anak untuk mencapai tujuannya.

KOLABORASI LINTAS SEKTOR SEBAGAI KUNCI AKSELERASI PENDIDIKAN

Fleksibilitas dari kebijakan merdeka belajar bertujuan untuk mendorong adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan pendidikan dan juga lintas sektor melalui salah satunya penguatan implementasi dan kontekstualisasi dari kurikulum, pedagogi dan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan anak. Melalui tajuk merdeka belajar, sistem pendidikan saat ini mendorong kolaborasi pentahelix dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media saling memberikan umpan balik dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan.

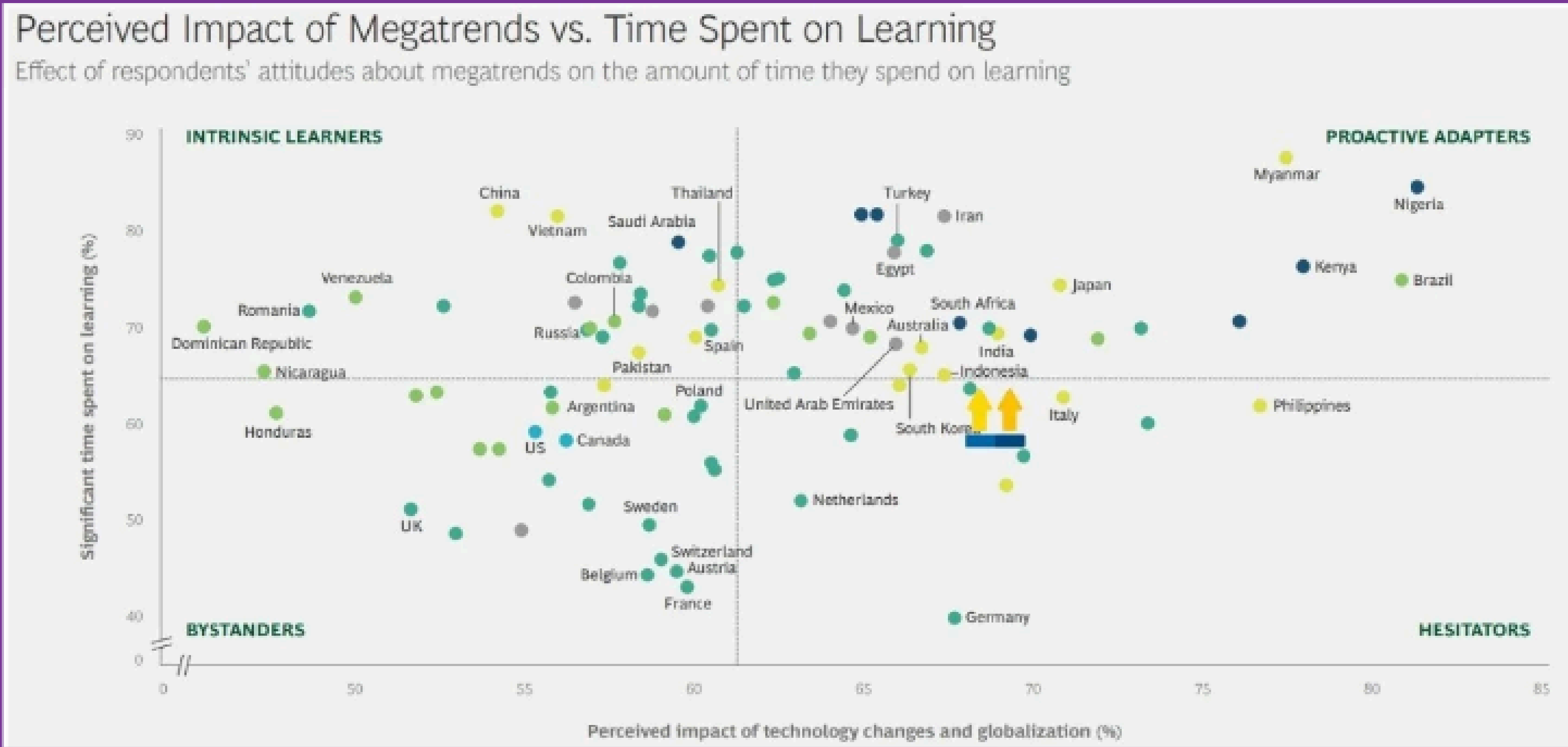


(Gambar 1, Sinergi pentahelix antara entitas pendidikan dengan pemangku kepentingan lainnya Sumber: Nizam, (2021))

Kolaborasi lintas peran dan sektor ini membuka potensi lahirnya inovasi dalam praktik pendidikan yang belum ada sebelumnya. Salah satu contoh dari kolaborasi lintas peran yang Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) sedang jalankan adalah melalui inisiatif Pengukuran Mandiri Literasi & Numerasi PSPK (PEMANTIK), yaitu asesmen diagnostik untuk membantu pendidik untuk mengetahui tingkat kemahiran peserta didik yang mereka ajar sehingga dapat membantu proses perancangan pembelajaran terdiferensiasi pada tingkat kelas dimanapun dan kapanpun mereka butuhkan. Kolaborasi ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam

pendidikan seperti Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan, yayasan pendidikan serta lembaga satuan pendidikan. Contoh baik lainnya adalah implementasi dari inisiatif teaching factory (TeFa), yaitu program pendidikan vokasi yang mengundang keterlibatan dunia industri untuk berinvestasi pada pendidikan dan satuan pendidikan untuk menyelaraskan keterampilan yang diajarkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Adanya estafet upaya kolaboratif dalam pengembangan pendidikan ini akan menjadikan cita bersama membangun SDM unggul dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan hanya narasi angan-angan belaka. Optimisme ini hadir karena terdapat catatan positif bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cenderung proaktif, yang berarti cenderung melihat ke depan dengan optimisme serta berupaya secara aktif untuk beradaptasi menghadapi dinamika perubahan zaman. Statement ini dapat dilihat pada hasil penelitian Boston Consulting Group (2021) berikut:



(Gambar 2, Posisi Indonesia masuk kategori negara dengan SDM 'Proactive Adapters') Sumber: Boston Consulting Group, 2021

Hasil dari upaya transformasi pendidikan selama ini yang sudah menuju ke arah sinergi antara satuan pendidikan dengan arah pembangunan melalui penguatan kemitraan dan program yang memfasilitasi kolaborasi dunia kerja dengan entitas pendidikan telah menunjukkan beberapa hasil positif. Terdapat banyak inisiatif dari Pemerintah yang sudah dan sedang berjalan memberikan banyak berkontribusi pada peningkatan daya saing anak-anak Indonesia yang dibingkai dalam berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kebijakan Merdeka Belajar, Kartu Prakerja, Jarvis Kemenperin, Skillhub Kemnaker, Digitalent Scholarship, Beasiswa LPDP, Dana Abadi Pendidikan, maupun program Pemerintah lainnya. Berbagai kebijakan-kebijakan tersebut berbuah manis dengan hasil yang dapat dilihat dalam publikasi International Institute for Management Development (IMD) melalui rilis World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 tentang daya saing berbagai negara dunia. Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun lalu di posisi 34 dan masuk tiga besar di kawasan Asia Tenggara.

MENGUATKAN SATUAN PENDIDIKAN DENGAN KEBIJAKAN YANG MENDORONG KOLABORASI

Strategi dan kebijakan pendidikan ke depan harus diarahkan secara akseleratif untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, sehingga proses belajar pada pendidikan formal, non formal, maupun informal memiliki ruang luas untuk partisipasi multi pihak, khususnya dunia kerja. Entitas di luar pendidikan perlu diberdayakan untuk memberikan umpan balik (link and match) agar pendidikan kita mampu teraktualisasi cara, konten, serta kurikulum pembelajarannya agar relevan dengan kebutuhan saat ini maupun yang akan datang (future outlook).

Perlu dipahami, pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan SDM Indonesia hadir sebagai solusi dengan 2 (dua) fungsi, yakni entitas pendidikan baik satuan pendidikan ataupun lembaga pendidikan sebagai enabler untuk mengaktivasi ekosistem kolaborasi multi pihak lintas sektor, dan aligner atau penyelaras yang mengintegrasikan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa yang akan datang, karena kemajuan harus diawali dari kolaborasi untuk mengartikulasikan dan menyepakati strategi untuk mengoptimalkan potensi, sekaligus mencari jalan keluar atas permasalahan dan tantangan yang ada.

Kendati demikian, kewajiban dalam menyiapkan masyarakat yang berdaya saing tidak hanya cukup dengan investasi serta penyesuaian dari sisi pendidikan, sebagai yang mempersiapkan supply, tapi juga dibutuhkan penyesuaian dari pasar tenaga kerja untuk dapat memastikan agar kesejahteraan masyarakat mendapatkan penghargaan terhadap lulusan (Lauder et al., 2020). Perlu ada sistem penghargaan yang kuat untuk setiap anak Indonesia agar lebih sejahtera dan jelas secara career path. Artinya, secara paralel perlu pembenahan pada tata kelola pasar kerja agar SDM yang ada dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai bakat, minat, sekaligus mempertemukan pemberi kerja agar mendapatkan SDM yang sesuai kebutuhan, sehingga ke depan akan lebih banyak kesempatan karir dan apresiasi yang sejalan dengan investasi pada bidang pendidikan, dan pada ujungnya ialah membangun keinginan setiap anak bangsa untuk terus belajar dan mengembangkan diri sehingga lebih lanjut memberikan kemajuan bagi negara secara makro.

QR Code Referensi



Penulis: Allamuddin AF, Peneliti di
Pusat Studi Pendidikan dan
Kebijakan (PSPK)

PAUD sebagai Fondasi Kuat dalam Pendidikan

Indah Shafira | Founder Seruni Montessori School
| Master of Education, Harvard University

Mengukur Kualitas edukasi murid di Indonesia

Kualitas edukasi murid di Indonesia masih memprihatinkan yang tercermin dari skor asesmen internasional seperti PISA, TIMSS, WB Learning Poverty yang konsisten berada di ranking terendah bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kondisi ini diperparah dengan pandemi covid-19 yang diestimasikan oleh World Bank, SMERU, UNICEF dll akan mengurangi skor pisa 25 point serta ketertinggalan belajar (learning loss) sebanyak 0.9-1.5 tahun.

Apa yang membuat pendidikan anak usia dini (PAUD) krusial?

PAUD merupakan fondasi dasar bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak yang dampaknya sepanjang hayat. Berdasarkan penelitian saya ketika S2 di Harvard, Investasi pada PAUD memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kemampuan akademik dan sosial anak di kemudian hari, termasuk peningkatan skor PISA ketika mereka memasuki pendidikan menengah. PAUD bukan hanya untuk mempersiapkan anak masuk ke sekolah dasar tetapi berdampak hingga ia di sekolah menengah, tinggi, bahkan ada studi Perry School yang menemukan dampak program PAUD yg berkualitas thd karier dan pendapatan seorang anak 30 tahun kemudian.



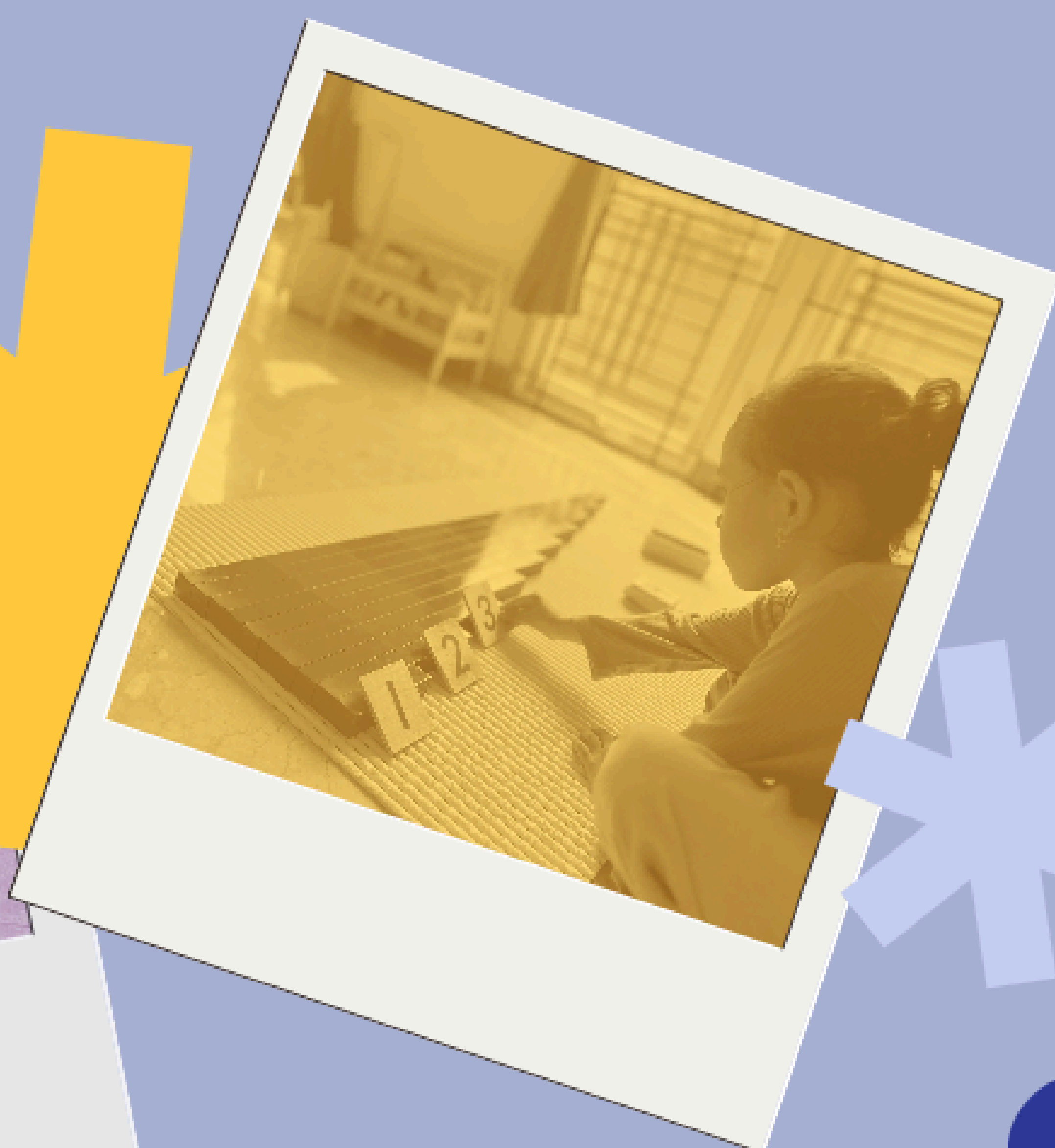
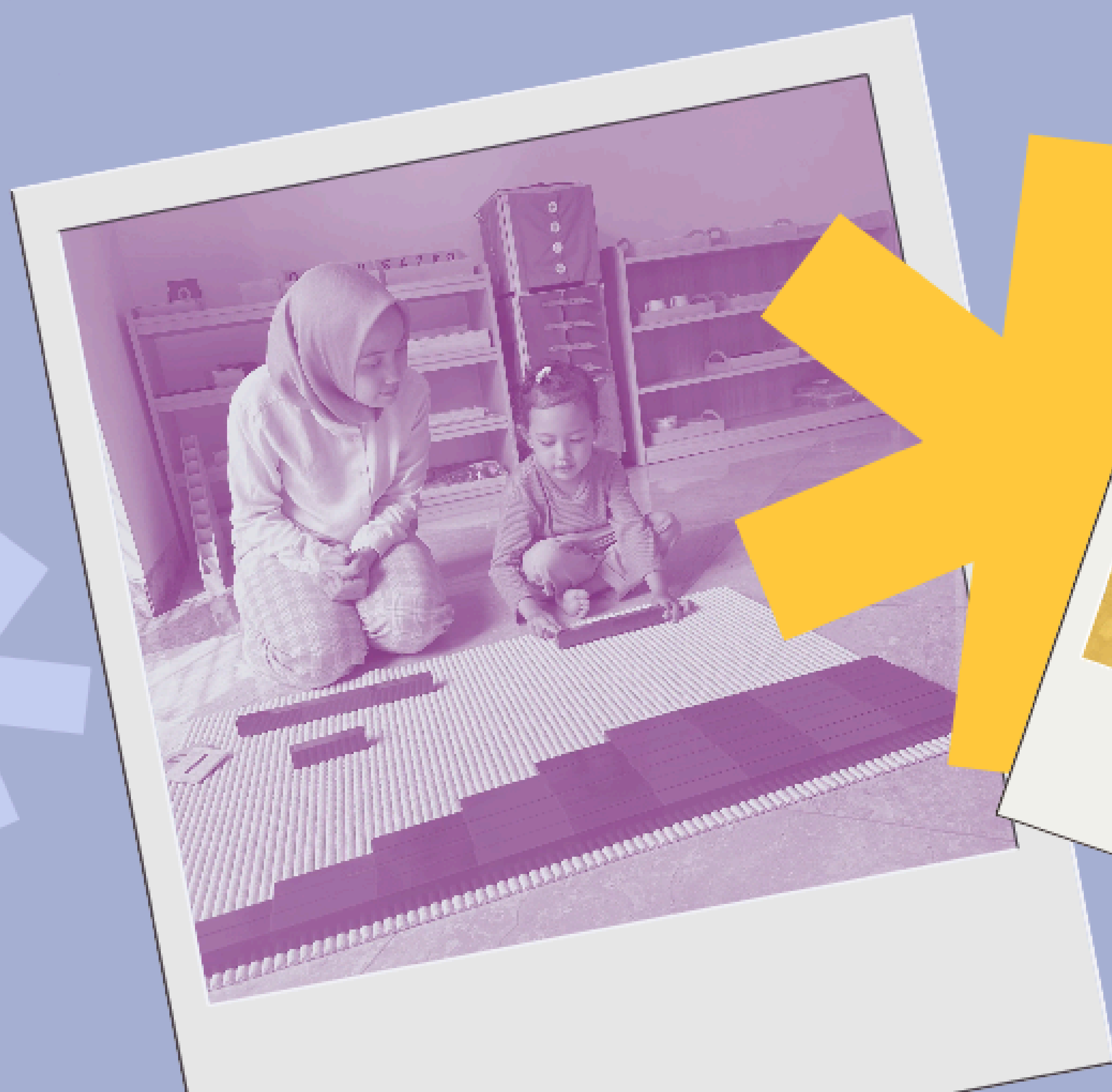
Bagaimana kondisi PAUD di Indonesia saat ini?

PAUD di Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa tahun terakhir alokasi anggaran pemerintah, PAUD masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Dari reformasi pendidikan kemdikbud ristek melalui 26 Episode Merdeka Belajar saja kebijakan PAUD baru dibahas di episode ke 24. Ada kebijakan wajib belajar 12+1 namun tidak merata, kenyataannya di daerah masih banyak yang belum bisa akses PAUD dan akses PAUD yg berkualitas harganya cukup mahal sehingga menyebabkan ketimpangan sosial. Masih diperlukan intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas PAUD di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.



Apa yang membedakan Seruni Montessori School dengan PAUD lainnya?

Seruni Montessori School berbeda dengan PAUD lainnya karena menggunakan metode Montessori yang fokus pada pembelajaran yang hands-on dan pengembangan kemandirian anak. Metode ini juga memperkenalkan konsep abstrak menjadi konkret melalui berbagai alat montessori yang terbukti secara saintifik, membantu anak belajar mengembangkan kemampuan sosio emosional dan kognitif. Selain itu metode ini juga berpusat pada anak, di kelas setiap anak punya kurikulum individual. Mereka dibebaskan untuk memilih dan bekerja dengan alat yang anak minati dan sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya. Sementara di sekolah konvensional kelas cenderung berpusat pada guru dimana guru memimpin dan anak-anak mengerjakan kegiatan yang seragam.



Mahasiswa UI Gak 'Napak Bumi'



Eitss jangan salah! di UI, ada nih kepanitiaan yang berfokus pada pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Acaranya dilaksanakan selama 30 hari di pelosok Indonesia lho! menarik kan?

Kali ini Seruni berkesempatan untuk melakukan wawancara yang daging banget dengan Project Officer dari Gerakan UI Mengajar 14. Langsung aja, selamat menikmati!

BAGAIMANA GUIM MELIHAT KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN ANTARA DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI INDONESIA?

GUIM melihat masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia sebagai hal yang nyata. Ini salah satu alasan mengapa GUIM masih berlayar pada tahun ke-14 ini, simply karena masalahnya belum selesai; kebutuhannya masih ada. Ketimpangannya pun hadir dalam rupa yang berbeda-beda, mulai dari jumlah guru, pemberdayaan guru, fasilitas sekolah, bahkan akses menuju sekolah. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika pengabdian GUIM 13 kemarin, aku selalu mendapati pemandangan guru yang harus pergi ke spot tertentu untuk mencari sinyal karena absen guru ditetapkan lewat sebuah aplikasi.

Menarik ya, saat di kota akses sinyal internet bukanlah masalah untuk kita, ditambah pemerintah kerap menerapkan digitalisasi pendidikan, namun ternyata kebijakannya, bisa kita lihat, belum bisa diterapkan di semua sekolah. Kami, Gerakan UI Mengajar, sadar betul bahwa kehadiran kami bukanlah jawaban dari penyelesaian masalah ketimpangan pendidikan, namun kami hadir membawa semangat pergerakan dan semangat inspirasi untuk anak-anak usia sekolah dasar di pelosok.



CERITAKAN TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT YANG TELAH GUIM LAKUKAN DI BIDANG PENGAJARAN!

Gerakan UI Mengajar hadir untuk seluruh subjek yang terlibat dalam pendidikan, mulai dari anak, guru, orang tua, bahkan dinas pendidikan setempat. Program kerja inti di titik aksi adalah kegiatan belajar mengajar selama tiga minggu di kelas secara formal, namun pada waktu tertentu kita juga mengadakan program tambahan belajar untuk anak-anak. Kami juga mempunyai program home visit dan bincang orang tua untuk mengetahui kebutuhan anak dari sisi orang tua. Selain itu, kami pun turut memberdayakan guru lewat program kerja bincang guru dan pelatihan guru. Kegiatan pembelajaran formal akan ditutup dengan pembagian laporan hasil belajar ke orang tua murid.

Nah, tidak hanya itu, kami juga mempunyai program kerja di bidang non formal, seperti kelas informal tiap hari sabtu, rumah pelangi untuk revitalisasi perpustakaan, dan festival rakyat sebagai acara penutup kegiatan kami di titik aksi. Terakhir, seluruh hasil temuan dan rekomendasi kami untuk sekolah terkait juga akan diaudiensikan kepada pihak dinas pendidikan setempat dalam bentuk laporan rekomendasi. Nah, banyak dan seru banget kan program kerja GUIM 14? Kebetulan banget, kita mau buka open recruitment untuk kamu yang ingin terlibat menjadi pengajar GUIM 14 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah! Intip instagram @uimengajar untuk tahu info lebih jelasnya ya.



APA SAJA TANTANGAN TERBESAR YANG GUIM HADAPI SELAMA MENJALANKAN PROGRAM PENGAJARAN DI DAERAH-DAERAH TERPENCIL ATAU KURANG BERKEMBANG?

Hmmm, tantangan pertama yang jelas akan dihadapi adalah keterbukaan dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat pada GUIM itu sendiri, singkatnya GUIM tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan banyak pihak. Selain itu, pengajar juga perlu menyesuaikan pembelajaran yang dibawa dengan kemampuan anak di kelas. Seringnya, kami mendapati perbedaan kemampuan anak di sekolah kota dan pelosok. Saat mengajar, banyak kasus di mana kami tidak bisa menyamaratakan satu metode pembelajaran untuk semua anak karena semua anak mempunyai kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi, pengajar harus ekstra adaptif pada kondisi anak di kelas. Tak hanya itu, kami juga tetap harus menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya masyarakat setempat sembari juga tetap menjaga dinamika internal panitia selama 30 hari tinggal bersama.



BISAKAH ANDA BERBAGI KISAH SUKSES ATAU PENGALAMAN INSPIRATIF DARI PROGRAM PENGAJARAN YANG TELAH GUIM JALANKAN?

Aduh ini banyak banget, tapi aku coba pilih momen-momen favoritku yaa. Setelah kepulanganku dari aksi GUIM 12 di Nganjuk, aku dikirimkan video dari anak kelas 5 dan 6 SD di mana mereka saat itu menirukan tagline GUIM 12, yaitu “Berbagi Warna Melukis Cita”. Namun, mereka menggantinya menjadi: GUIM 22: “Berbagi Warna Melukis Cita”. Mereka berharap 10 tahun mendatang, mereka bisa sekolah tinggi dan kuliah di Universitas Indonesia lalu ikut membagikan inspirasi di GUIM kembali. Aku juga turut mendapati momen di mana setelah festival rakyat GUIM 13 di Lampung, semua orang tua murid menangis dan memeluk kami semua sambil mengucapkan terima kasih karena sudah datang dan mengajar anak mereka. 30 hari di titik aksi akan menghasilkan banyak momen indah dan berkesan, kami datang dengan tangan kosong, namun pulang dengan hati yang penuh.

MENURUT GUIM, APA PERAN PENTING YANG DAPAT DIMAINKAN OLEH MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA?

GUIM selalu menekankan bahwa masalah pendidikan di Indonesia bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau mahasiswa jurusan pendidikan. Pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab kita semua, ini merupakan investasi untuk kehidupan anak-anak kita di masa depan. Selain itu, masalah pendidikan di Indonesia juga sangat kompleks, tidak ada satu kebijakan yang sifatnya one fit for all. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa datang untuk melihat secara aktual bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia dan mengajak semua pihak di dalamnya untuk bergerak serta berkolaborasi bersama. Jadi, yuk, sadar, lihat, dan terlibat!

APA SAJA RENCANA ATAU PROGRAM MASA DEPAN YANG AKAN GUIM JALANKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN?

Khusus untuk akses pendidikan, kami mempunyai program kerja Rumah Pelangi di mana kami akan revitalisasi perpustakaan sekolah dengan mempercantik perpustakaan dengan lukisan tangan dan mengisi perpustakaannya dengan donasi buku yang kami bawa dari Depok. Selain itu, kami juga menyediakan program Pelatihan Guru sebagai bentuk upgrading skill guru yang disesuaikan dengan kebutuhan guru di titik aksi. Melalui program tersebut, harapannya, anak menjadi lebih dekat dengan buku dan guru mempunyai tambahan ilmu untuk mengajar anak di kelas.





FAKTA-FAKTA Mencengangkan Sistem Pendidikan di Dunia,

No. 8 Bikin Geleng-Geleng!



Setelah melewati proses yang cukup panjang dalam ekosistem pendidikan di Indonesia, pastinya sobat-sobat sudah pernah melihat atau bahkan merasakan sendiri hal-hal unik yang ada dalam pendidikan di Indonesia, seperti guru killer yang bikin greget, Sistem Kebut Semalam yang jadi kebiasaan tiap ujian, atau keharusan untuk mengarang bebas saat ujian karena sama sekali tidak mengerti materi yang diujikan. HAHA!

Tapi, kali ini, Seruni akan membahas tentang hal-hal unik dalam sistem pendidikan yang ada di negara-negara lain. Agar wawasan kita makin kaya, langsung saja CEKIDOT!

FINLANDIA

GURU HARUS SUDAH S2?

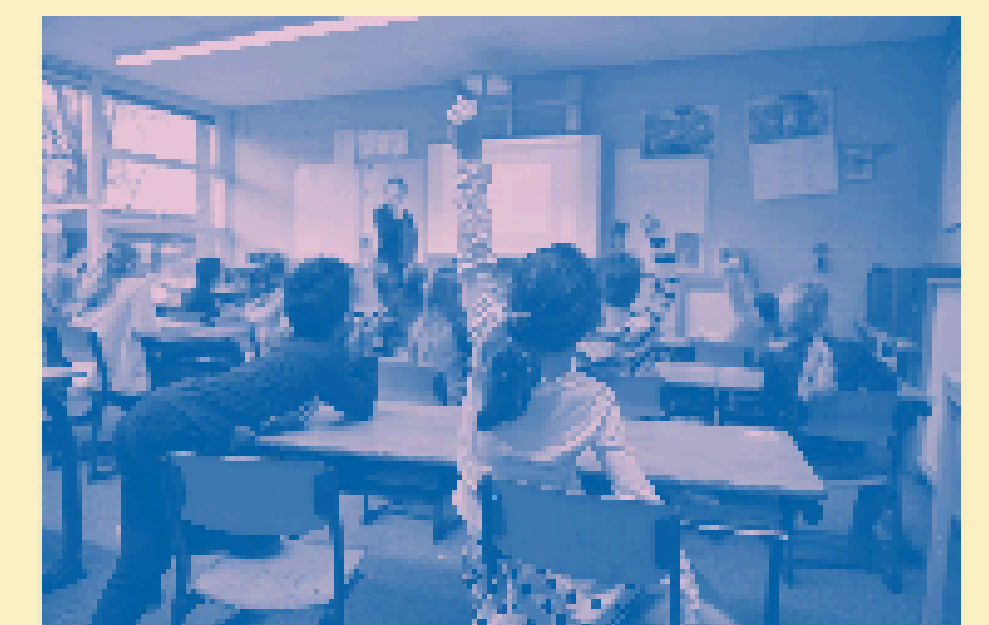


sumber: [Vepar5 from Getty Images](#)

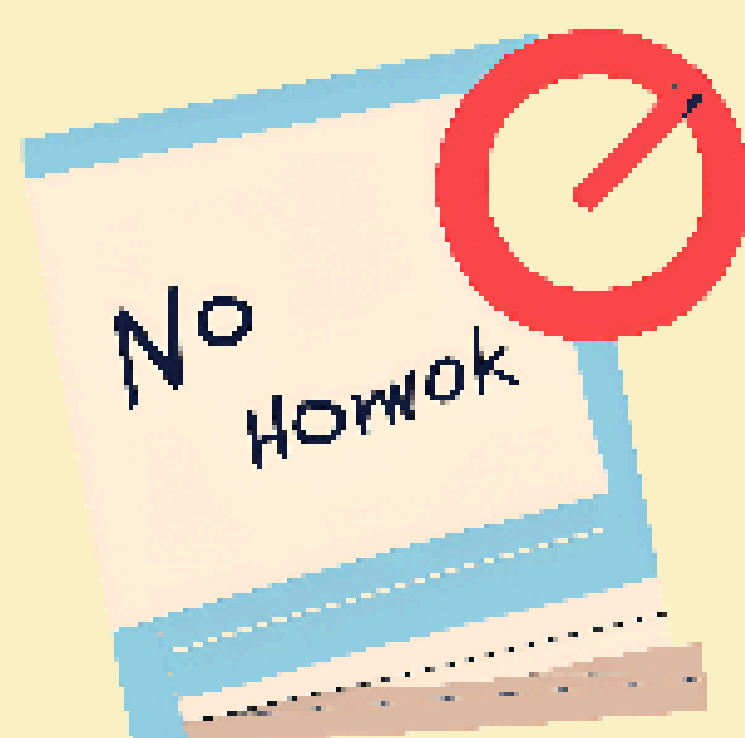
Salah satu faktor penting dalam suksesnya pendidikan di Finlandia adalah kualitas gurunya. Bahkan, untuk menjadi guru setingkat SD, SMP, atau SMA, mereka harus memiliki gelar S2 atau master. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. Pasalnya, guru di Finlandia diberi hak untuk mengimplementasikan kurikulum dan penilaian mandiri terhadap siswanya. Bahkan, mereka diberi kebebasan untuk menentukan sumber ajar sesuai dengan keadaan muridnya. Kebijakan ini bisa saja cocok dengan realitas pendidikan di Indonesia yang memiliki keadaan yang beragam dari segi infrastruktur, geografis, sampai budaya. Akan tetapi, sudahkah Indonesia menghargai profesi seorang guru?

JAM SEKOLAH BENTAR BANGET!

Di negara yang digadang-gadang memiliki sistem pendidikan paling maju di dunia ini, anak usia sekolah hanya akan menghabiskan 4 hingga 5 jam dalam sehari untuk belajar di sekolah. Agar mereka tidak jenuh, sekolah-sekolah juga menyediakan waktu istirahat sekitar 15 menit untuk tiap sekitar 45 menit pembelajaran. Artinya, setiap hari terdapat 4 hingga 5 kali istirahat di sekolah. Bisa dicontoh nih, biar tiap pelajaran yang ada di pikiran bukan cuma es teh manis sama masakan favorit di kantin. HAHA!



sumber: [Arthur Krijgsman from Pexels](#)



JARANG ADA PR!

Fakta satu ini nih yang pastinya akan menjadi favorit para pembaca Seruni Magazine. IYA! Di Finlandia, murid-murid hanya akan menghabiskan sekitar 2,8 jam dalam seminggu. Alih-alih membebani anak-anak dengan PR, orang tua Finlandia percaya bahwa para guru akan memberikan semua pendidikan yang mereka butuhkan saat mereka di sekolah sehingga di luar sekolah siswa-siswi dapat lebih banyak mengeksplor secara mandiri hal-hal yang menarik bagi mereka. Tapi kembali lagi, dibutuhkan kualitas guru yang mumpuni agar kegiatan ajar mengajar dapat semaksimal mungkin diselesaikan di sekolah.

JERMAN

KULIAH DI PTN GRATIS!

Siapa sih yang ga tau sama negara dimana seorang Habibie, ilmuwan hebat sekaligus Mantan Presiden ke-7 Indonesia, menempuh pendidikan tinggi. Benar sekali, Jerman! Nah, di sebagian besar perguruan tinggi Jerman, ternyata biaya pendidikannya gratis. mahasiswa disana hanya perlu membayar uang sumbangan sarana pendidikan per semester (Semesterbeitrag) yang jumlahnya tergantung kondisi kotanya. Uang tersebut bukan ditujukan untuk perguruan tinggi, melainkan kepada sebuah yayasan nirlaba yang disebut dengan Studentenwerk untuk dikelola menjadi suatu manfaat bagi mahasiswa, seperti subsidi untuk makan di kantin sekolah, subsidi asrama, dan tiket transportasi umum.



sumber: [Jacob Lund](#)



sumber: [Study.com](#)

MATA UANG MEREKA GAMBARNYA ILMUWAN!

Mata uang Jerman, baik yang lama maupun yang baru seringkali menampilkan gambar para ilmuwan. Penemu-penemu fenomenal seperti Albert Einstein (fisikawan), Carl Friedrich Gauss (matematikawan), Robert Koch (Bapak Bakteriologi), dan W. C. Roentgen (penemu x-ray) muncul di uang-uang mereka. Mereka menjadi pengingat tiap kali mereka bertransaksi bahwa para ilmuwan dan intelektual lah, yang membuat mereka maju dan makmur seperti saat ini. Hal itu menunjukkan betapa diharganya kontribusi intelektual mereka.

CHINA



sumber: [MediaProduction from Getty Images](#)

15 JAM PER MINGGU UNTUK MATEMATIKA!

Murid-murid China terkenal dengan kemampuan matematika yang impresif. Hal ini tentu saja bukan tanpa sebab. Kebijakan Satu Anak, seringkali dipandang sebagai pendorong bagi orangtua untuk menaruh ekspektasi yang tinggi atas hasil akademik anak-anak mereka. Bahkan, murid-murid disana bisa menghabiskan 15 jam dalam satu minggu untuk belajar matematika yang terdiri dari waktu ajar dan PR. Waduh!

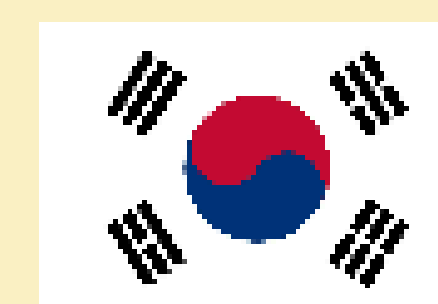
WAJIB TIDUR SIANG?

Ya, ada beberapa distrik di China yang mewajibkan tidur siang bagi murid di sekolah. Misalnya, distrik Qiantang di Hangzhou yang menerapkan standar untuk tidur siang bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Mereka mewajibkan setidaknya 30 menit tidur dalam posisi berbaring selama istirahat makan siang. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur siswa dan kesehatan fisik mereka. Bahkan, banyak sekolah yang menyediakan berbagai fasilitas seperti kursi yang dapat dipakai untuk berbaring dan kasur lipat. Duh, enak ya!



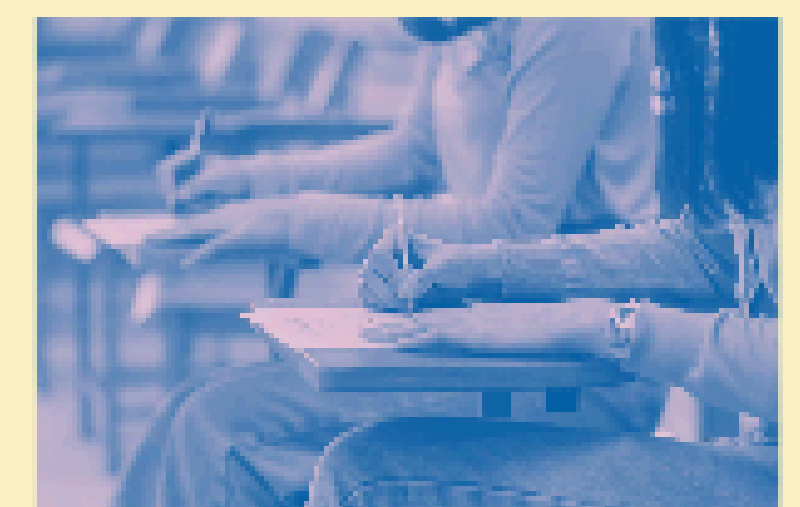
sumber: [Ababsolutum from Getty Images](#)

KOREA SELATAN



UJIAN 8 JAM YANG MENENTUKAN SEGALANYA

Setiap tahun di bulan November, CSAT atau College Scholastic Ability Test membuat seluruh negeri terhenti. Keheningan bisa menyelimuti seluruh ibu kota Korea Selatan. Toko-toko sepi, bank-bank tutup, bahkan pasar saham terlambat buka di hari besar tersebut. Mungkin terdengar melebihi-lebihkan, tetapi ujian ini memang begitu berarti bagi mereka. Ujian maraton yang dapat menghabiskan 8 jam ini tidak hanya menentukan tempat mereka berkuliah, tetapi juga dapat mempengaruhi prospek pekerjaan, tempat tinggal, bahkan hubungan mereka di masa depan. Saking seriusnya ujian ini, para pembuat soal harus diisolasi selama sebulan lho!



sumber: [Sengchay Int](#)

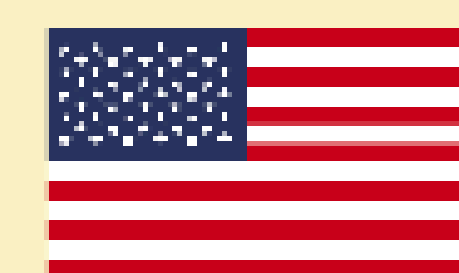


sumber: [Quora](#)

WAJIB PAKAI SANDAL DI KELAS?

Siapa yang pernah dimarahi guru karena nyeker ke kelas sehabis bermain bola? Di Korea, hal itu tidak akan terjadi. Sebab, sekolah di Korea Selatan tidak mewajibkan siswanya untuk memakai sepatu di sekolah. Bahkan, murid-murid di sana dilarang untuk menggunakannya di dalam kelas. Pihak sekolah biasanya akan menyediakan loker atau rak untuk mengganti sepatu mereka dengan sandal. Kebijakan itu diterapkan agar murid merasa nyaman berada di dalam kelas, seperti di rumah sendiri.

AMERIKA SERIKAT



sumber: [pixelshot](#)

BEBAS PAKAI APA SAJA KE SEKOLAH!

Pernah nonton film atau series Amerika Serikat tentang kehidupan percintaan di sekolah? Eits, kali ini kita tidak membicarakan tentang percintaannya, tetapi coba deh lihat pakaian yang mereka kenakan ke sekolah. Yap, kebanyakan sekolah di sana tidak mewajibkan siswanya untuk memakai seragam ke sekolah. Hal ini membuat siswanya dapat bebas berekspresi dan merasa nyaman saat bersekolah. Terlebih, tidak mewajibkan seragam dapat mengurangi beban finansial orang tua karena mereka tidak perlu membeli seragam khusus.

PENDIDIKAN SEKSUAL?

Tak dapat dipungkiri jika di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan persoalan seksual masih menjadi perkara yang tabu untuk dibahas. Padahal, topik seksual sendiri menjadi persoalan yang harus dipahami secara baik dan tepat oleh anak-anak dari berbagai rentang usia sesuai porsinya. Nah, Amerika Serikat merupakan salah-satu negara yang sudah terbuka dengan pendidikan seksual lho! Bahkan, beberapa negara bagian sudah mewajibkan pendidikan tersebut sejak taman kanak-kanak.



sumber: [pixelshot](#)

DISCLAIMER!

Kalau kata orang sunda, "One size doesn't fit all". Tidak ada ukuran sepatu yang dapat muat untuk semua orang. Jadi, tidak semua kebijakan pendidikan di negara-negara di atas dapat kita tiru secara plek ketiplek. Kita perlu memilah dan menyesuaikannya dengan realita pendidikan di Indonesia. Sekian, terimakasih!



Otonomi vs. Beban Keuangan: Dilema Sebuah PTNBH

Cecep Darmawan

Guru Besar Ilmu Politik dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia, Pengamat Kebijakan Pendidikan

Dasar Kebijakan PTNBH yang dilakukan pemerintah

Kebijakan PTNBH merupakan **amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012** Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dalam UU Dikti mengatur ketentuan PTNBH secara umum seperti status, statuta, kewenangan, otonomi, sampai bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH. Adapun ide dasar dari PTNBH ini ialah agar perguruan tinggi tidak sekedar menjadi lembaga yang hanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi semata. Status PTNBH ini memiliki harapan **agar perguruan tinggi mampu membangun kemandirian dan otonomi yang utuh** untuk mengembangkan institusinya menjadi lebih berkualitas dan bermutu serta berdaya saing menuju perguruan tinggi kelas dunia (world class university). Dengan kemandirian dan otonomi yang penuh ini, diharapkan PTNBH mampu secara leluasa atau fleksibel mengatur dan mengembangkan institusinya baik secara akademik maupun non akademik.

Akan tetapi, dalam implementasinya pemerintah terkesan seolah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan di PTNBH. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya bantuan pendanaan atau anggaran pembiayaan pendidikan bagi PTNBH. Akibatnya, PTNBH dibiarkan mencari pendanaan sendiri melalui berbagai sumber pendapatan atau income generating untuk mendanai biaya operasional dan pengembangan institusinya. Sayangnya, PTNBH cenderung membebaskan sumber pendapatannya dari masyarakat. Misalnya ada kecenderungan jika PTNBH seolah memiliki ketergantungan untuk meraup pendapatan dari tarif UKT mahasiswa.

Padahal, PTNBH semestinya mampu memberdayakan sumber daya insannya untuk mengembangkan modal intelektual (intellectual capital) melalui hasil kajian, riset, inovasi, dan paten yang memiliki daya jual di dunia usaha dan dunia industri dan bermanfaat bagi masyarakat. Di samping pengembangan aset yang dimiliki PTNBH, modal intelektual inilah yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi pendanaan PTNBH. PTNBH pun dapat melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah, masyarakat, CSR perusahaan nasional maupun lembaga internasional untuk mendapatkan income generating guna pengembangan institusinya.

Dampak pembentukan PTNBH terhadap otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan keuangan dan akademik

Berdasarkan otonominya, ada tiga klasifikasi PTN yakni PTNBH, PTN Badan Layanan Umum, dan PTN Satuan Kerja. Dari ketiga jenis tersebut, PTNBH memiliki otonomi yang lebih luas, mandiri dan fleksibel dibandingkan dengan jenis PTN Lainnya. Otonomi ini mencakup:

- 1) Bidang akademik yakni meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma.
- 2) Bidang non akademik yakni meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.

Akan tetapi, dalam implementasinya otonomi yang diberikan cenderung setengah hati. Terdapat problematika terkait otonomi di PTNBH. Misalnya dalam otonomi pengelolaan keuangan di PTNBH yang masih bertabrakan dengan rezim peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, terjadi salah tafsir otonomi di PTNBH yang harus mandiri dalam aspek keuangan dengan minimnya daya dukung anggaran dari pemerintah. Begitu pun pada otonomi akademik, seringkali Kemendikbud Ristek mengeluarkan peraturan yang berisi panduan-panduan ataupun ketentuan-ketentuan yang merintangi otonomi akademik di PTNBH.

Apakah PTNBH menjadi penyebab kenaikan UKT?

Dalam Pasal 65 Ayat (4) UU Dikti diatur bahwa pemerintah memberikan penugasan kepada PTNBH untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh masyarakat. Artinya, secara normatif status PTNBH tidak menjadi penyebab kenaikan UKT. Akan tetapi, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mengapa kenaikan UKT terjadi di PTN khususnya PTNBH:

Pertama, minimnya alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Sebagaimana Dilansir dari Kompas.id (23 Mei 2024), hanya mendapat alokasi Rp 56,1 triliun atau 1,6% dari total APBN. Padahal standar ideal dari UNESCO ialah sebesar 2% dari APBN untuk anggaran pendidikan tinggi. Kedua, terjadi ketimpangan alokasi anggaran antara PTN dengan perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Berdasarkan data KPK, pada 2024 anggaran untuk PTN hanya sebesar Rp 7 triliun, berbanding terbalik dengan anggaran PTKL yang begitu besar yakni sebanyak Rp 32,86 triliun. Dengan minimnya bantuan anggaran untuk pembiayaan pendidikan tinggi, membuat PTNBH menaikkan tarif UKT untuk meraup pendapatan atau income generating guna mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh institusi PTNBH.

Solusi dalam Implementasi dan pengawasan pemerintah terhadap kebijakan PTNBH

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) UU Dikti maupun Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diamanatkan pentingnya evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap berbagai pola pengelolaan PTN, termasuk PTNBH.

Evaluasi kinerja ini penting untuk mengawasi sejauh mana implementasi kebijakan PTNBH baik di bidang akademik maupun non akademik apakah memenuhi standar kualitas dan mutu yang layak atau tidak. Jika PTNBH tidak memenuhi evaluasi kinerja ini, maka pemerintah semestinya menurunkan statusnya kembali menjadi PTN BLU atau bahkan menjadi PTN Satker.

Solusi ke depan agar PTNBH mampu menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh masyarakat:

- Perlu dilakukan realokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN untuk menunjang pembiayaan PTNBH agar lebih optimal. Pemerintah diharapkan tidak lepas tanggung jawab terhadap pembiayaan pendidikan tinggi, sekalipun berstatus PTNBH.
- Perlu penegakan aturan untuk mengatasi ketimpangan alokasi anggaran antara PTN dengan PTKL. Sebagaimana amanat Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh PTKL.
- PTNBH harus mengoptimalkan otonomi yang dimilikinya secara kreatif dan inovatif guna memperoleh pendapatan atau income generating dari berbagai sumber lainnya, jangan hanya bergantung pada UKT mahasiswa.



BOSAN DENGAN RUTINITAS KULIAH? ATAU SUKA MENGAJAR?

SIMAK

4 PROGRAM VOLUNTEER **BERIKUT YANG WAJIB KAMU IKUTI!**



GUIM merupakan program kerja di bawah Departemen Sosial Masyarakat BEM UI yang berfokus pada pemerataan pendidikan tingkat SD. Pada Bulan Januari 2024, GUIM telah sukses menjalankan programnya di Lampung yang berlangsung selama sebulan. Tenang aja, program ini dilaksanakan saat liburan semester kok. kamu bisa kepoin lebih lanjut di Instagram [@uimengajar](#)

Gerakan UI Mengajar

Ayo Mengajar Indonesia



Ayo Mengajar Indonesia adalah sebuah Yayasan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan pemuda-pemudi Indonesia di berbagai wilayah, seperti Bogor dan Jogja. Selain mengajar, kamu bisa mengikuti program sekolah alam, sekolah bahasa, pentas seni dan masih banyak lainnya. Cek selengkapnya di instagram [@ayo_mengajar](#)

Terminal Hujan



Terminal Hujan adalah sebuah gerakan independen berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Terminal Baranangsiang Kota Bogor.

Teman-teman bisa menjadi relawan tenaga pendidikan untuk anak usia dini hingga sekolah menengah atas!! Yuk kepoin lebih lanjut di instagram [@terminal_hujan](#)

Cocok banget buat kamu yang minat bahasa inggris! English To Knock The Door (ETKTD) merupakan komunitas relawan yang mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di Rawa Buaya, Jakarta Barat. Pasti ada banyak permainan seru! yuk cari tahu lebih lanjut di instagram [@etktd.volunteer](#)



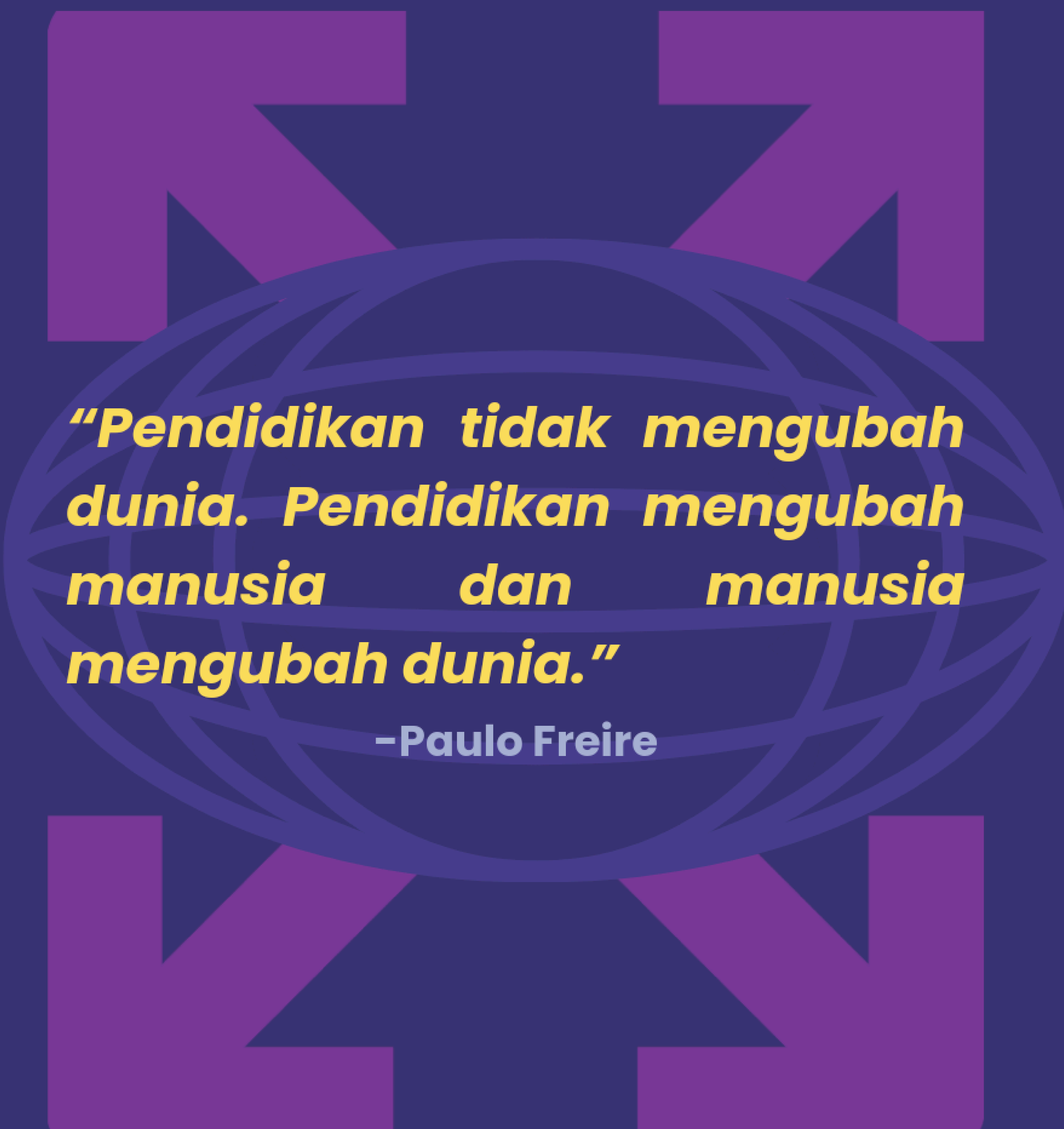
English to Knock The Door

Gimana, siap jadi pahlawan tanpa jubah? Yuk ikut berperan dalam mencerdaskan anak bangsa!





POTRET SERUNI



“Pendidikan tidak mengubah dunia. Pendidikan mengubah manusia dan manusia mengubah dunia.”

– Paulo Freire

Dari Kami untuk Negeri ^{10th}SERUNI

